

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata tanpa adanya disparitas. Selain untuk mensejahterakan masyarakat, pembangunan ekonomi juga bertujuan untuk mengejar ketertinggalan serta mensejajarkan diri dengan wilayah yang sudah maju. Ada beberapa faktor yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi diantaranya pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan antar penduduk (Todaro, 2006).

Menurut Boediono (2013) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Artinya perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya.

Selain itu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah disparitas. Disparitas merupakan salah satu akibat yang terjadi karena adanya perbedaan kondisi demografi suatu daerah. Disparitas ini mengakibatkan terbentuknya daerah maju dan daerah berkembang yang pada akhirnya akan berdampak pada disparitas pendapatan antar masyarakat. Terjadinya ketimpangan pendapatan akan berpengaruh terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas pendapatan adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita dan jumlah penduduk. Selain itu menurut Adelman dan Morris (1973) dalam Arsyad (2010) ada beberapa penyebab terjadinya disparitas pendapatan di negara berkembang, yaitu :

- a) Pertambahan penduduk yang tinggi akan memicu penurunan pendapatan per kapita.
- b) Inflasi yang tidak diikuti dengan pertambahan produksi barang-barang secara proporsional.
- c) Ketidakteraturan pembangunan antar daerah.
- d) Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal sehingga persentase pendapatan dari tambahan modal lebih besar daripada persentase pendapatan yang berasal dari tenaga kerja. Hal ini mengakibatkan semakin tingginya angka pengangguran.
- e) Rendahnya mobilitas sosial.
- f) Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan pada harga barang-barang hasil industri guna melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
- g) Memburuknya nilai tukar bagi negara berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju sebagai akibat adanya ketidakelestarian permintaan terhadap barang-barang ekspor negara berkembang.
- h) Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi yang terletak di Pulau Sumatera yang terdiri dari 7 kota dan 12 kabupaten, dimana 4 kabupaten merupakan kabupaten pemekaran yaitu Kabupaten Mentawai, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dhamasraya dan Kabupaten Pasaman Barat. Jika dilihat dari banyaknya kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat tentu saja terjadi disparitas baik dari segi pendapatan maupun pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto perkapita kota lebih tinggi dari Produk Domestik Regional Bruto perkapita di daerah kabupaten. Rata-rata pertumbuhan ekonomi kota dan kabupaten Sumatera Barat berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita tahun 2006 sampai tahun 2013 adalah sebesar 5,96%. Dari tahun 2006 sampai tahun 2013 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita di kabupaten dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita di kota terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita di kabupaten sebesar 5,54 dan tahun 2013 sebesar 7,44. Sedangkan pada tahun 2006 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita di kota sebesar 8,16 dan tahun 2013 sebesar 10,94.

Disparitas juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang terdapat pada suatu daerah yang juga akan berdampak pada terjadinya disparitas pendapatan. Banyaknya jumlah penduduk jika tidak diiringi dengan pembukaan lapangan usaha baru tentu saja akan menyebabkan terjadinya pengangguran. Pendapatan penduduk yang bekerja pada sektor pemerintah atau swasta tentu saja akan

berbeda dengan penduduk yang bekerja paruh waktu atau tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hal ini akan menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan.

Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat menunjukkan bahwa jumlah penduduk kabupaten dan kota di Sumatera Barat tahun 2006 sampai tahun 2013 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2006 jumlah penduduk kabupaten dan kota adalah sebesar 4.632.052 jiwa. Sedangkan pada tahun 2013 jumlah penduduk adalah sebesar 5.066.296 jiwa.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik di kabupaten maupun kota serta jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini akan mengakibatkan tingginya tingkat disparitas pendapatan antara kabupaten dan kota. Akan tetapi belum diketahui seberapa besar pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan jumlah penduduk kabupaten dan kota terhadap disparitas pendapatan antara kabupaten dan di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini lah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disparitas Pendapatan Di Provinsi Sumatera Barat (Studi Komparatif Kabupaten Dengan Kota)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Produk Domestik Regional Bruto mempengaruhi disparitas pendapatan di kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2006-2013?
- b. Bagaimana jumlah penduduk mempengaruhi disparitas pendapatan di kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2006-2013?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap disparitas pendapatan di kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2006-2013.
- b. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap disparitas pendapatan di kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2006-2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian baik terhadap peneliti maupun masyarakat, yaitu :

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah ilmu dan wawasan mengenai disparitas pendapatan antara kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
- b. Sebagai bahan kajian atau masukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan topik penelitian.

- c. Bagi universitas, dapat dijadikan sebagai sumbangan keilmuan dan menambah daftar kepustakaan.

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini akan menganalisis tentang pengaruh rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan rata-rata jumlah penduduk terhadap rata-rata disparitas pendapatan antara kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder periode 2006 sampai dengan 2013 dengan menggunakan metode Ordinary Least Square(OLS).

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi enam bab. Adapun masing-masing bab secara singkat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian. Berdasarkan rumusan masalah akan diperoleh tujuan dan manfaat serta ruang lingkup dari penelitian serta akan dijelaskan pula sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdapat uraian mengenai kerangka teori dan tinjauan pustaka yang terdiri dari pandangan-pandangan secara teoritis yang berkaitan dengan masalah penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dibuat.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang model penelitian, jenis dan sumber data, metode analisis data yang digunakan serta definisi operasional variabel.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan kondisi umum daerah penelitian dan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat serta jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat.

BAB V : TEMUAN EMPIRIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian serta menjelaskan penjabaran data, hasil pengolahan data dan kemudian interpretasi dari hasil pengolahan data tersebut.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan berisi saran untuk berbagai pihak.